

MERAWAT DEMOKRASI

Oleh : Munawar Noor
Email: mn10120@gmail.com

Abstract

The idea of democracy dates back to ancient Greece in the 4th century BC, the City State implemented a Democracy system that involved the community in making political decisions, where the area of the city was actually small and the population was entitled to vote for approximately 300 thousand people. Montesquieu set up a system that can guarantee the political rights of the people (trias politica), which is a system of separation of powers within the state into legislative, executive and judicial powers, each held by a different person.

Democracy as a system has been used as an alternative in various social and state activities in several countries. There are two reasons for choosing democracy as a social and state system.

First, almost all countries in the world have made democracy a fundamental principle. Secondly, democracy as a principle of state has essentially provided direction for the role of the community to organize the State as its highest organization. Therefore, true knowledge and understanding of citizens is needed about democracy.

Carrying out democracy means straightening the intention to uphold the rights of others in opinion and accepting a different opinion or view in public requires common sense, because only by activating common sense can the potential to arrive at a substantial democracy will be realized.

A democracy can be said to fail if it experiences a deadlock or stagnation in the process. Maintaining or caring for democracy in a country is not easy. There are a number of things that need to be considered so that the political order of a country's democracy remains on track, namely in accordance with the rule of law and the constitution and democratic values.

Keywords: Caring, Democratic Values, Rule of Law, Political Order

A. PENDAHULUAN

Demokrasi adalah keadaan negara dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada ditangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat yang berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan rakyat (Trianto Cs, 2007). Dengan demikian demokrasi dapat dikatakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat yaitu

adanya tuntutan atau dukungan dari rakyat sebagai masukan , kemudian tuntutan itu dipertimbangkan dan dimusyawarahkan oleh rakyat yang duduk di lembaga legislatif sebagai proses konversi dan hasilnya berupa kebijaksanaan atau aturan untuk rakyat sebagai keluaran. Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberi pengertian bahwa negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat dengan kata lain pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (*Government of the people, by the people and for the people Abraham Lincoln dalam Winarno, 2009*).

Jadi demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang selalu melibatkan warga negaranya dalam pengambilan keputusan pemerintahan yang sangat penting dalam rangka kemajuan negara kedepannya. Ide Demokrasi berawal dari zaman Yunani kuno pada abad 4 SM, Negara kota (*City State*) melaksanakan sistem Demokrasi yang melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan politik, dimana wilayah kota ini sebetulnya kecil dan penduduk yang berhak memilih kurang lebih 300 ribu orang. Bagi budak dan orang asing tidak berhak memilih. Budaya Yunani ini hilang setelah bangsa Eropa Barat mengalahkan bangsa Romawi sebagai bangsa yang memahami budaya demokrasi Yunani ini. Sehingga pada abad 600-1400 M dikenal dengan abad pertengahan yang bercirikan feodal, kehidupan sosial dan spiritual dikuasai oleh paus dan kehidupan politik diperebutkan diantara para bangsawan. Sehingga kehidupan yang dihadapi masyarakat waktu itu merupakan zaman kegelapan.

Tahun 1215 lahirlah kesepakatan Raja dengan kaum bangsawan di Inggris disebut dengan Magna Charta yang berisikan kontrak antara kaum bangsawan dengan raja Jhon Lackland, piagam tersebut berisi 2 prinsip dasar yaitu kekuasaan raja dibatasi dan hak asasi manusia lebih penting dari pada kedaulatan raja. Jhon Lackland adalah pengganti raja Richard yang terkenal dengan raja bijaksana, sementara raja Jhon Lackland bertindak sewenang-wenang pada rakyat dan kaum bangsawan. Setelah Magna Charta ini

bermunculanlah negara nasional bercirikan demokrasi, yang mendorong terjadinya perubahan sosial dan budaya yang berintikan pada kemerdekaan akal dan ratio dari berbagai pembatasan. Hal ini dikenal dengan Renaissance (1350-1600) yang berpengaruh di Eropa Selatan seperti Italia dan Reformasi (1500-1600) yang mendapat banyak pengikut di Eropa Utara seperti Jerman dan Swiss.

Renaissance adalah aliran yang menghidupkan kembali minat kesusastraan dan kebudayaan Yunani kuno yang semula berorientasi pada tulisan keagamaan kemudian bergeser kearah keduniaan, akhirnya melepaskan diri dari penguasaan gereja. Ide dasarnya adalah kebebasan berfikir dan bertindak bagi manusia tanpa boleh orang lain menguasai atau membatasi. Sisi baik dari renaissance ini adalah kehidupan dunia yang lebih modern serta IPTEK yang berkembang pesat. Sisi buruknya adalah berkembangnya sifat-sifat yang kontra sosial seperti kebencian, iri hati dan cemburu. Aliran renaissance ini muncul karena didorong oleh perang salib antara Kristen dan Islam selma 200 tahun (1096-1291) dalam memperubatkan Yerusalem.

Zaman kegelapan diabad pertengahan ini terjadi karena struktur sosial dikuasai gereja dan politik bersifat feodal sehingga masyarakatnya tenggelam dalam kebodohan. Disisi lain dunia islam berada pada puncak kejayaan dibidang ilmu pengetahuan. Dengan kekalahan islam dengan perang salib, maka ilmu pengetahuan yang dikembangkan kelompok islam., dibawa ke Eropa untuk dikembangkan oleh kelompok Kristen. Reformasi yaitu revolusi agama di Eropa barat abad 16 awalnya pergerakan perbaikan keadaan dalam gereja katolik kemudian berkembang menjadi asas-asas Protestanisme. Reformasi dimulai ketika Martin Luther menempelkan 95 dalil pada pintu gereja Wittenberg 31 Oktober 1517. Yang memancing terjadinya serangan terhadap gereja.

Martin Luther memiliki ajaran tentang pengampunan dengan kepercayaan sebagai pengganti upacara-upacara, pekerjaan baik dan perantaraan geraja serta membaca kitab suci memberikan

pertanggungjawaban lebih besar kepada perseorangan untuk keselamatan sendiri. Ajaran Martin Luther iniditerima diseluruh Jerman. Dengan selesainya reformasi maka Protestanisme yang lahir semasa reformasi tidak ikut hilang, melainkan menjadi kekuatan dasar dunia barat sampai sekarang. (Supriatnoko, 2008). Perkembangan berikutnya muncul pendapat tentang pemerintah demokrasi dari Jhon Locke (1632-1704) dari Inggris, ia mengatakan bahwa hak-hak politik rakyat mencakup hak atas hidup (*life*), hak atas kebebasan (*liberty*), hak memiliki (*property*), harus dijamin dalam pemerintahan.

Kemudian Montesquieu (1689-1755) dari Perancis menyusun sistem yang dapat menjamin hak politik rakyat (*trias politica*) yaitu suatu sistem pemisahan kekuasaan dalam negara kedalam kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, masing-masing dipegang oleh orang yang berbeda.

B. MAKNA DAN HAKIKAT DEMOKRASI

Demokrasi sebagai suatu sistem telah dijadikan alternatif dalam berbagai tatanan aktivitas bermasyarakat dan bernegara di beberapa Negara. Ada dua alasan dipilihnya demokrasi sebagai sistem bermasyarakat dan bernegara.

Pertama, hampir semua negara didunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental. Kedua, demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan Negara sebagai organisasi tertingginya. Oleh karena itu, diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang benar pada warga masyarakat tentang demokrasi.

Pengertian demokrasi dapat dilihat dari tinjauan bahasa (*epistemologis*) dan istilah (*terminologis*). Secara epistemologis demokras terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu *demos* yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan *cratein* atau *cratos* yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa *demos-cratein* atau *demos-cratos* adalah keadaan Negara di mana dalam sistem pemerintahannya

kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintah rakyat dan oleh rakyat.

Kesimpulan-kesimpulan dari beberapa pendapat diatas adalah bahwa hakikat demokrasi sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat baik dalam penyelenggaraan berada di tangan rakyat mengandung pengertian tiga hal, yaitu:

- a. Pemerintahan dari rakyat (*government of the people*), Mengandung pengertian yang berhubungan dengan pemerintah yang sah dan diakui (*ligimate government*) dimata rakyat. Sebaliknya ada pemerintahan yang tidak sah dan tidak diakui (*unligimate government*). Pemerintahan yang diakui adalah pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan rakyat. Pentingnya legitimasi bagi suatu pemerintahan adalah pemerintah dapat menjalankan roda birokrasi dan program- programnya.
- b. Pemerintahan oleh rakyat (*government by the people*), Pemerintahan oleh rakyat berarti bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaan atas nama rakyat bukan atas dorongan sendiri. Pengawasan yang dilakukan oleh rakyat (*sosial control*) dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat maupun tidak langsung (melalui DPR).
- c. Pemerintahan untuk rakyat (*government for the people*), Mengandung pengertian bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah dijalankan untuk kepentingan rakyat. Pemerintah diharuskan menjamin adanya kebebasan seluas-luasnya kepada rakyat dalam menyampaikan aspirasinya baik melalui media pers maupun secara langsung.

C. DEMOKRASI SEBAGAI PANDANGAN HIDUP

Menurut Nurcholis Madjid, demokrasi bukanlah kata benda, tetapi lebih merupakan kata kerja yang mengandung makna sebagai proses dinamis. Demokrasi adalah proses menuju dan menjaga *civil society* yang menghormati dan berupaya merealisasikan nilai-nilai demokrasi (Sukron Kamil, 2002). Tujuh norma-norma dan pandangan hidup demokratis yang dikemukakan oleh Nurcholis Madjid (Cak Nun), sebagai berikut:

- a. Pentingnya kesadaran akan pluralisme., Hal ini tidak sekedar pengakuan (pasif) akan kenyataan masyarakat yang majemuk. Lebih dari itu, kesadaran akan kemajemukan menghendaki tanggapan yang positif terhadap kemajemukan itu sendiri secara aktif. Kesadaran akan pluralitas sangat penting dimiliki bagi rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sangat beragam dari sisi etnis, bahasa, budaya, agama dan potensi alamnya.
- b. Musyawarah, Internalisasi makna dan semangat musyawarah menghendaki atau meharuskan keinsyafan dan kedewasaan untuk dengan tulus menerima kemungkinan terjadinya “*partial finctioning of ideals*”, yaitu pandangan dasar belum tentu, dan tidak harus, seluruh keinginan sepenuhnya.
- c. Pertimbangan moral, Pandangan hidup demokratis mewajibkan adanya keyakinan bahwa cara haruslah sejalan dengan tujuan. Bahkan sesungguhnya klaim atas suatu tujuan yang baik harus diabsahkan oleh kebaikan cara yang ditempuh untuk meraihnya. Demokrasi tidak terbayang terwujud tanpa akhlak yang tinggi. Dengan demikian pertimbangan moral (keseluruhan akhlak) menjadi acuan dalam berbuta dan mencapai tujuan.
- d. Permufakatan yang jujur dan sehat, Suasana masyarakat demokratis dituntut untuk menguasai dan menjalankan seni permusyawaratan yang jujur dan sehat itu guna mencapai permufakatan yang juga jujur dan sehat. Permufakatan yang dicapai melalui *engineering*, manipulasi atau merupakan permufakatan yang curang, cacat atau sakit, malah dapat disebut

sebagai penghianatan pada nilai dan semangat musyawarah. Musyawarah yang benar dan baik hanya akan berlangsung jika masing- masing pribadi atau kelompok yang bersangkutan memiliki kesediaan psikologis untuk melihat kemungkinan orang lain benar dan diri sendiri salah, dan bahwa setiap orang pada dasarnya baik, berkecenderungan baik, dan beriktikad baik.

- e. Pemenuhan segi- segi ekonomi, Masalah pemenuhan segi-segi ekonomi yang dalam pemenuhannya tidak lepas dari perencanaan sosial-budaya. Warga dengan pemenuhan kebutuhan secara berencana, dan harus memiliki kepastian bahwa rencana-rencana itu benar- benar sejalan dengan tujuan dan praktik demokrasi. Dengan demikian rencana pemenuhan kebutuhan ekonomi harus mempertimbangkan aspek keharmonisan dan keteraturan sosial.
- f. Kerjasama antar warga untuk mempercayai iktikad baik masing- masing., Kerjasama antar warga untuk mempercayai iktikad baik masing- masing, kemudian jalinan dukung- mendukung secara fungsional antara berbagai unsur kelembagaan kemasyarakatan yang ada, merupakan segi penunjang efisiensi untuk demokrasi. Pengakuan akan kebebasan nurani (*freedom of conscience*), persamaan percaya pada iktikad baik orang dan kelompok lain (*trust attitude*) mengharuskan adanya landasan pandangan kemanusiaan yang positif dan optimis.
- g. Pandangan hidup demokratis harus dijadikan unsur yang menyatu dengan pendidikan demokrasi., Pandangan hidup demokrasi terlaksana dalam abad kesadaran universal sekarang ini, maka nilai- nilai dan pengertian – pengertiannya harus dijadikan unsur yang menyatu dengan sistem pendidikan kita. Perlu dipikirkan dengan sungguh-sungguh memikirkan untuk membiasakan anak didik dan masyarakat umumnya siap menghadapi perbedaan dan pendapat dan tradisi pemilihan terbuka untuk mentukan pemimpin atau kebijakan. Jadi pendidikan demokrasi tidak saja dalam kajian konsep verbalistik , melainkan telah

membumi dalam interaksi dan pergaulan sosial baik dikelas maupun diluar kelas.

Tumbuh dan berkembangnya demokrasi dalam suatu Negara memerlukan ideology yang terbuka, yaitu ideologi yang tidak dirumuskan “sekali dan untuk selamanya” (*once and for all*), tidak dengan ideology tertutup yaitu ideology yang konsepnya (*presept*) dirumuskan “sekali dan untuk selamanya” sehingga cenderung ketinggalan zaman (*obsolete*, seperti terbukti dengan ideology komunisme). Dalam konteks ini Pancasila-sebagai ideology Negara harus ditatap dan ditangkap sebagai ideology terbuka, yaitu lepas dari kata literalnya dalam pembukaan UUD 1945. Penjabaran dan perumusan *presept*-nya harus dibiarkan terus berkembang seiring dengan dinamika masyarakat dan pertumbuhan kualitatifnya, tanpa membatasi kewenangan penafsiran hanya pada suatu lembaga “resmi “ seperti di negeri- negeri komunis. Karena itu, ideology Negara- Pancasila-Indonesia dalam perjumpaannya dengan konsep dan sistem demokrasi terbuka terhadap kemungkinan proses –proses ‘coba dan salah’ (*trial and error*), dengan kemungkinan secara terbuka pula untuk terus menerus melakukan koreksi dan perbaikan, justru titik kuat suatu ideology yang ada pada suatu Negara ketika berhadapan dengan demokrasi adalah ruang keterbukaan. Karena demokrasi dengan segala kekurangannya, ialah kemampuannya untuk mengoreksi dirinya sendiri melalui keterbukaannya itu. Jadi bila demokrasi ingin tumbuh dan berkembang dalam Negara Indonesia yang mempunyai ideology Pancasila mensyaratkan ideology tersebut sebagai ideology terbuka.

D. JENIS DEMOKRASI

- a. Demokrasi Rakyat, Dalam penyelenggaraan negara selalu melibatkan peran rakyat, terutama dalam hal yang sangat penting seperti pemilihan anggota legislatif, Presiden, gubernur, wali kota / bupati. Sekarang ini berdasar UUD 1945 maka pemilihan Presiden, Gubernur, Walikota / Bupati langsung dipilih oleh rakyat.

- b. Demokrasi Sederhana, Demokrasi ini berjalan didalam masyarakat yang berpola hidup sederhana seperti masyarakat di pedesaan. Setiap melakukan kegiatan pembangunan desa selalu mengutamakan musyawarah desater lebih dahulu. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara bergotong royong dengan mengedepankan musyawarah. Memilih Kepala desa tidak ditunjuk oleh pemuka adat, atau tidak juga ditunjuk atas dasar musyawarah untuk mufakat, akan tetapi dilakukan dengan pemungutan suara, dimana calon pemilih terkonsentrasi disatu tempat, sehingga suara mayoritas yang diutamakan dan mengabaikan suara minoritas.
- c. Demokrasi Barat, Demokrasi barat dalam pelaksanaannya sangat mengedepankan hak kebebasan individu, Negara tidak boleh mencampuri urusan individu setiap orang dan juga tidak boleh mengganggu hak kebebasan setiap individu atau disebut juga liberalisme. Namun dalam penyelenggaraan Negara yang lebih berperan adalah kaum kapitalis atau orang yang banyak uang. Merekalah yang mampu bersaing dalam pemenangan dalam pemungutan suara dan pemerintahannya tidaklah korup karena mereka pada dasarnya sudah kaya.
- d. Demokrasi Komunis, Demokrasi di Negara komunis lebih mengutamakan kehendak penguasa dengan alasan kepentingan orang banyak. Oleh karena itu rakyat mau tidak mau harus mengikuti kemauan penguasa, sehingga penguasa dengan leluasa menentukan segalanya tanpa terlebih dahulu meminta pendapat dari rakyatnya. Untuk kelancaran program pemerintah maka dalam Negara hanya boleh satu partai politik saja yaitu partai politik yang berkuasa saat itu,
- e. Demokrasi Semu, Dalam Negara seolah-olah ada demokrasi, pada hal sesungguhnya tidak menganut paham demokrasi karena segala sesuatu ditetapkan oleh penguasa Negara. Eksekutif, Legislatif, Yudikatif berada disatu tangan, sehingga pemerintahannya bersifat absolut yakni apa kata penguasa maka rakyat wajib mengikutinya tanpa boleh menyanggah

sedikitpun. Pendirian partai politik sangat dilarang dalam Negara, sehingga demokrasi disesuaikan dengan tingkat kebutuhan Negara.

- f. Demokrasi Pancasila, Demokrasi ini berdasarkan Pancasila artinya pemerintahan yang dilaksanakan sesuai dengan kehendak rakyat tapi dijiwai oleh nilai-nilai dari sila-sila Pancasila. Jadi kegiatan negara harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari rakyat melalui perwakilannya di DPR. Bentuk persetujuan rakyat tersebut dituangkan dalam bentuk undang-undang yang dijiwai oleh nilai-nilai dari sila-sila Pancasila. Kemudian oleh pemerintah dijabarkan dalam bentuk peraturan pemerintah, dilanjutkan dalam bentuk peraturan Presiden dan seterusnya. Dengan demikian apa yang dijalankan oleh pemerintah telah memenuhi rasa kehendak rakyat yang dijiwai oleh nilai-nilai dari sila-sila Pancasila. Disebutlah demokrasi Pancasila artinya kekuasaan tertinggi ditangan rakyat dan dijiwai oleh sila-sila Pancasila.

E. PRINSIP DASAR DEMOKRASI PANCASILA

Prinsip dasar demokrasi Pancasila adalah kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan artinya kerakyatan berarti kedaulatan ada ditangan rakyat, yang dipimpin oleh hikmat (bersumber dari tuhan) kebijaksanaan (sebagai hasil usaha pemikiran akal budi manusia) yang menyeimbangkan akal, rasa dan kehendak dalam permusyawaratan melalui perwakilan seluruh rakyat. Jadi prinsip dasar demokrasi Pancasila adalah kerakyatan, hikmat kebijaksanaan, permusyawaratan, perwakilan. (Ismaun dalam Bakry, 2009) Prinsip Kerakyatan berarti Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat, rakyat yang berdaulat. Jadi secara teoritis kedaulatan tertinggi dalam negar berada ditangan seluruh rakyat Indonesia, bersifat tunggal, utuh, tidak terbagi. Sistem pemerintahan Indonesia yang memperhatikan rakyat banyak.

Prinsip Hikmat Kebijaksanaan berarti dalam melaksanakan kedaulatan rakyat itu terikat oleh pimpinan semacam aturan, yang dinamakan hikmat kebijaksanaan sebagai paduan antara firman-firman Tuhan YME dan hasil

usah pemikiran manusia untuk mencari kebenaran (rasionalisme) dan paduan itu menjadi hukum.

Hikmat adalah suatu kebenaran yang mengandung manfaat atau maslahat bagi kepentingan umum yang bersumber dari wahyu Ilahi. Kebijakan ialah melakukan perbuatanatas dorongan kehendak berdasarkan putusan akal yang sesuai dengan rasa kemanusiaan, kebenarannya dari akal manusia yang adil, masuk akal (rasional dan logis) serta baik, karena secara bersih dan tulus ikhlas menghargai pendapat orang lain.

Prinsip permusyawaratan berarti bahwa untuk memperoleh hikmat kebijaksanaan itu harus dilakukan melalui musyawarah yakni rapat sebagai forum pembicaraan, pertukaran pikiran dan sebagainya untuk mendapatkan kesepakatan dari semua pihak yang berkepentingan. Dalam musyawarah ini mempertemukan beberapa pendapat menjadi satu kesatuan sebagai kesepakatan atau mencari kesatuan dalam keragaman.

Prinsip Perwakilan berarti bahwa kedaulatan rakyat itu pelaksanaannya diamanatkan untuk dijalankan oleh wakil-wakil rakyat yakni penyelenggaraan kehidupan negara atau pemerintah dalam arti luas. Wakil-wakil rakyat dimaksud harus orang-orang yang diambil dari kalangan rakyat, dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum dan harus pula bekerja untuk kepentingan uruh serakyat.

F. MEKANISME DEMOKRASI PANCASILA

Mekanisme adalah suatu susunan yang terdiri atas bagian-bagian yang dalam hubungan antara satu dengan lainnya merupakan satu kesatuan yang berproses. Demokrasi yang dikembangkan di Indonesia saat ini adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah paham demokrasiyang bersumber kepada kepribadian dan falsafah hidup bangsa indonesia yang perwujudannya berdasarkan ketentuan UUD 1945.

Dasar dari Demokrasi Pancasila adalah kedaulatan rakyat seperti tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Pelaksanaanya tercantum dalam

pasal 1 ayat 2 berbunyi : Kedaulatan ditangan rakyat dilaksanakan menurut UUD.

Asas Demokrasi Pancasila terdapat pada sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan. Dalam Demokrasi Pancasila dimana rakyat merupakan subyek demokrasi artinya rakyat secara keseluruhan berhak ikut secara efektif menentukan kebijakan negara dalam rangka pembangunan bangsa dan negara masa depan. Mekanisme Demokrasi Pancasila pada dasarnya sudah diuraikan dalam UUD 1945 yaitu tentang sistem pemerintahan negara seperti paham negara hukum, paham konstitusionalisme, supremasi ditangan rakyat, pemerintahan yang bertanggung jawab, pemerintahan berdasarkan perwakilan, sistem pemerintahan presidentil, dan pengawasan parlemen terhadap pemerintah. Supremasi (kekuasaan tertinggi) ditangan rakyat mengandung 4 fungsipenting sebagai wujud kedaulatan rakyat yaitu :

1. Rakyat memiliki kekuasaan berdasarkan hukum untuk menetapkan segala sesuatu yang telah ditegaskan oleh UUD 1945. Pemerintah menjalankan kekuasaan sebagai wujud dari amanat yang diberikan rakyat.
2. Pemerintah menjalankan kekuasaan atas nama rakyat,....dalam menjalankan kekuasaannya pemerintah berada dalam pengawasan rakyat, maka pemerintah harus tunduk kepada pengawas rakyat.
3. Kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah dijalankan untuk kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat harus diutamakan, pemerintah harus mendengarkan aspirasi rakyat dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan.
4. Tidak adanya otorita tandingan baik dari perorangan atau kelompok kepartaian ataupun badan yang mempunyai kekuasaan untuk mengesampingkan sesuatu yang telah diputuskan oleh pemerintah yang mengakomodasikan aspirasi rakyat.

Sendi pokok sistem politik demokrasi Indonesia (Winarno, 2009)

- a. Ide kedaulatan rakyat, bahwa yang berdaulat di Negara demokrasi adalah rakyat
- b. Negara berdasar atas hukum, Negara demokrasi juga Negara hukum
- c. Bentuk Republik, Negara dibentuk untuk memperjuangkan kepentingan umum (republika).
- d. Pemerintahan berdasarkan Konstitusi, Penyelenggaraan berdasarkan konstitusi / UUD
- e. Pemerintahan yang bertanggung jawab, Pemerintahan Negara yang dalam menjalankan pemerintahan harus bertanggung jawab kepada rakyat
- f. Sistem Perwakilan , Demokrasi yang dijalankan adalah demokrasi perwakilan, wakil rakyat dipilih melalui pemilihan umum.
- g. Sistem pemerintahan Presidential, Presiden adalah penyelenggara negara tertinggi. Pressiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

G. IMPLEMENTASI DEMOKRASI

Penyelenggaraan Pemilu (Kepala Daerah maupun Anggota Legislatif) terjadi manuver politik oleh para elite mengundang kritikan keras atas praktik demokrasi di Indonesia. Dalam jumpa pers Forum Indonesia untuk Demokrasi, Sabtu (2/5), sejumlah tokoh memberikan catatannya tentang demokrasi. Guru Besar Demokrasi Perguruan Pendidikan Demokrasi (P2D), Rahman Tolleng, mengatakan, demokrasi bukanlah sebuah produk yang langsung jadi. Demokrasi juga bukan menjanjikan semua masalah bisa dipecahkan. Dengan posisi itu, kita berpendirian untuk merawat demokrasi yang selama ini banyak kekurangannya, Akademisi Universitas Padjajaran, Syafei Anwar, mengatakan, kelemahan Indonesia saat ini adalah memiliki banyak politisi, tetapi miskin kenegarawanan. Oleh karena itu, Forum Indonesia untuk Demokrasi mengusulkan beberapa hal, di antaranya, merancang kembali hubungan institusional ketatanegaraan Indonesia, memperkuat sistem kepartaian dan memperbaiki mutu partai-partai sebagai alat perjuangan untuk kemaslahatan

rakyat. Usulan lain membuka kesempatan bagi organisasi sosial di luar partai politik untuk bekerja merawat demokrasi kesejahteraan dan menyerukan kepada pemerintah yang dipilih untuk meneguhkan komitmen kepada kebhineka-tunggal-ikaan dengan dasar Pancasila,

Partai-partai politik juga diingatkan untuk berhenti melayani pemimpin-pemimpin mereka dan mencurahkan perhatian pada program pengentasan masyarakat miskin dan perlunya Pemahaman Kembali Terhadap Demokrasi. Kesadaran terhadap pemahaman demokrasi semakin merosot dikalangan pelajar dan mahasiswa. Terbukti dengan banyaknya pernyataan-pernyataan mahasiswa yang mengatakan tidak percaya terhadap sistem Negara dalam menyelenggarakan pemilihan pimpinan bangsa ini bahkan dengan penyelenggara, pengawas dan pengamanan. Hal ini perlu tindakan baik pemerintah dan lapisan akademisi untuk memberikan pemahaman terutama anak muda sebagai penerus. Seputar pentingnya demokrasi baik melalui kurikulum pendidikan maupun melalui pelatihan-pelatihan dan sebagainya, karena sangat miris melihat pemuda yang mudah terpengaruh dengan pemahaman-pemahaman untuk merubah system bangsa ini. Pemilihan Presiden dan pemilihan anggota legislative tingkat provinsi dan daerah sangat berpengaruh terhadap senior dan ideologi organisasi. Hari ini organisasi mahasiswa sedang diuji untuk mengendepankan idealis dan independensi organisasi. Terutama pimpinan organisasi mahasiswa sebagai publik figure yang menjadi panutan haruslah memberikan pemahaman kepada kader-kadernya bahwa mengawal demokrasi sangatlah penting dari pada sibuk menyatakan sikap terhadap calon pilihannya. Secara aturan tidak ada yang salah menyatakan sikap terhadap pilihannya, namun sebagai perkumpulan mahasiswa yang mempunyai kekuatan secara ideology dan massa maka peran organisasi mahasiswa sangatlah diharapkan demi terciptanya keharmonisan dalam pesta demokrasi saat ini. Dalam pidatonya, Presiden Pertama Indonesia Ir. Sukarno pernah mengatakan jangan mewarisi abu sumpah pemuda, tapi warisi Api sumpah pemuda.

H. PENUTUP

Setiap pilihan demokrasi tentu memiliki suatu konsekuensi yang harus ditanggung. Misalnya, Indonesia memilih konsep demokrasi langsung. Dengan desain pemilu secara serentak seperti sekarang ini, konsekuensinya adalah demokrasi berbiaya mahal dan proses pemilu (proses pemungutan suara dan rekapitulasi suara) memakan waktu yang lama. Banyaknya anggota KPPS yang meninggal dunia tidak dapat dikatakan sebagai sebuah kegagalan dalam berdemokrasi, tapi sebuah musibah. Suatu demokrasi dapat dikatakan gagal apabila demokrasi tersebut mengalami kebuntuan atau kebekuan dalam prosesnya. Menjaga atau merawat demokrasi dalam suatu negara bukanlah hal yang mudah. Ada beberapa hal yang kiranya perlu diperhatikan agar tatanan politik demokrasi suatu negara tetap berada di jalurnya, yaitu sesuai dengan aturan hukum dan konstitusi serta nilai-nilai demokrasi. Oleh karena itu, untuk merawat demokrasi, ada dua tahapan yang dapat dilakukan, yaitu tahapan sebelum pemilu dan sesudah pemilu.

Menyelenggarakan demokrasi artinya meluruskan niat untuk menjunjung hak orang lain dalam berpendapat dan menerima suatu pendapat atau pandangan yang berbeda di muka umum membutuhkan akal sehat, karena hanya dengan mengaktifkan akal sehat potensi tiba pada demokrasi yang substansial akan terwujud. Namun, hari-hari ini ikhtiar untuk merawat demokrasi telah tergelincir ke dalam permainan kriminalisasi politik hasrat. Di mana percakapan di ruang publik yang berbasis kekuatan rasional selalu dibatalkan oleh argumen yang tidak logis, akibatnya, bahasa percakapan, opini, dan diskursus di ruang publik selalu diawasi oleh mereka yang gemar membungkam pikiran dengan dalih doktrin agama. Di sinilah terjadi praktik pendangkalan nalar, di mana narasi kebenaran dikendalikan oleh mereka yang mengkalim penjaga kebenaran—yang selalu meminjam tangan aparatur negara, oleh karenanya menghasilkan demokrasi tanpa empirisme rasional sama dengan memburuk. Keadaan ini dipandang ganjil apabila harapan berubah menjadi ketakutan, hanya karena kita mempunyai pandangan yang berbeda

argumen yang berbasis logika, bukan dalil agama. Tentu kita akan hidup dalam suasana penuh kecemasan—yang dibuntuti oleh rasa ketakutan, karena alam demokrasi kita sekarang ini berubah: *from republic of hope be republic of fear*. Di mana dalam melebarkan percakapan diskusi di ruang publik telah dipasang rambu-rambu pikiran—disclaimer right. Hal semacam itulah yang mengancam kebebasan dan kemerdekaan orang berpendapat; argumen dianulir oleh kebenaran sepihak oleh para penuntut kebenaran dan inilah penyakit endemik demokrasi kita.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, Miriam (1983), "Dasar-Dasar Ilmu Politik", Gramedia, Jakarta.
- Bottomore, Tom (1983), "Sosiologi Politik", Bina Aksara, Jakarta.
- Dim. Guillenno O'Donnell, Phillipe C. Schmitter & Lawrence Whitehead (eds.). "Transisi Menuju Demokrasi: Tinjauan Berbagai Perspektif", 107-143. Terj. Jakarta: LP3ES.
- Duverger, Maurice (1993), "Sosiologi Politik", Grafindo Persada, Jakarta.
- Deverger, Maurice (1981), "Sosiologi Politik", Rajawali, Jakarta.
- Giddens, Anthony (1986), "Kapitalisme dan Teori Sosial Modern: Suatu Analisis Karya Tulis Marx, Durkheim, dan Max Weber", UI - Press, Jakarta.
- Polama, Margaret M. (1987), "Sosiologi Politik Kontemporer", Rajawali, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono (1990), "Sosiologi Suatu Pengantar", Rajawali Pers, Jakarta.
- Stepan. A. 1993. "Berbagai jalur menuju demokratisasi: sejumlah pertimbangan teoritis dan komparatif"
- Sulistyo, Hermawan (1990), "Sosiologi Politik: Ruang Lingkup dan Pengembangannya, dalam Jurnal Ilmu Politik", Gramedia, Jakarta.
- Sutrisno, Muji, 2000. "Demokrasi Semudah Ucapankah?" Yogyakarta: Penerbit Kanisius
- Wiyono. R (1982), "Organisasi Kekuatan Sosial Politik di Indonesia", Alumni, Bandung.